

ABSTRAK

Suatu perkawinan campuran akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya yaitu antara lain berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran antara lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang karena alam, karena tindakan manusia, karena peruntukan atau tujuannya melekat pada tanah.

Penelitian ini menelaah mengenai status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analitis serta sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Permasalahan dianalisis menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak dapat memiliki hak atas tanah karena adanya pencampuran harta bersama, kecuali jika mereka memiliki perjanjian kawin. Perjanjian kawin akan membebaskan WNI yang menikah dengan WNA dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA. Dimana Warga Negara Indonesia yang menikah dengan orang asing harus melepaskan kepemilikan hak atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun, Dengan demikian, maka dengan adanya pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) tersebut maka hak seorang WNI dalam sebuah perkawinan campuran adalah sepenuhnya tergantung pada perjanjian kawin. Sehingga kurang terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak-hak Warga Negara Indonesia dan keadilan hukum bagi Warga Negara Indonesia terhadap hak-haknya akibat perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan, adalah untuk memberikan keadilan, ketentraman serta kepastian hukum kepada suami-istri, anak-anak, dari harta kekayaan perkawinan demi menjamin masa depan.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Warga Negara Indonesia (WNI), Perjanjian Kawin.

ABSTRACT

A mixed marriage will bring legal consequences to the parties that do it, among other things related to property in marriage. The legal consequences of property in mixed marriages include the ownership of immovable property in the form of land and everything which is due to nature, because of human actions, because the designation or purpose is attached to the land.

This study examines the status of land ownership for Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. The research method used is normative juridical approach method. Specification The study used descriptive analytical as well as data sources using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Problems were analyzed using the theory of justice and legal certainty.

The results of this study indicate that Indonesian citizens who engage in mixed marriages can not own land rights due to the mixing of joint property, unless they have a marriage agreement. The marriage agreement will free Indonesian citizens who marry foreigners from the provisions of Article 21 paragraph (3) of the BAL. Where an Indonesian citizen who is married to a foreigner shall relinquish ownership of his / her right of land within a period of one year, Thus, with the limitation as reflected in Article 21 paragraph (3), the right of an Indonesian citizen in a mixed marriage is wholly dependent on marriage agreement. So that the lack of fulfillment of legal protection to the rights of Indonesian citizen and legal justice for Indonesian citizen to his rights due to mixed marriage. Under the terms of the mixed marriage law of marital property, it is to provide justice, peace and legal certainty to spouses, children, of marital property to secure the future.

Keywords: Mixed Marriage, Indonesian Citizen (WNI), Marriage Agreement.